Jurnal JISIPOL
Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung
Volume 9, Nomor 2, Mei 2025 (16-34)
(P-ISSN 2087-474X) (E-ISSN 3047-4272)

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) DAN ASET TETAP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

[1]Djodi Setiawan [2]Aditya Achmad Fathony [3]Fitri Yulianti Hermawan
[123] Fakultas Ekonomi, Universitas Bale Bandung, Bandung
Email: djodisetiawan130671@gmail.com

Received March 2025; Revised: May 2025; Accepted: May 2025; Published: May 2025; Available online: May 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Aset Tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di 25 (dua puluh lima) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Adapun kriteria yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dalam 1 (satu) dinas yaitu, Kepala OPD sebagai pimpinan pengambil kebijakan, Sekretaris sebagai pengelola administrasi, Bagian Keuangan sebagai pengelola laporan keuangan dan Bagian Pengelola BMD sebagai pengelola Barang Milik Daerah (BMD). Teknik penentuan sampel yaitu menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Jenis data yang digunakan adalah data primer dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS Versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Aset Tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Kata kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Aset Tetap dan Kualitas Laporan Keuangan

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Implementation of Government Accounting Standards (SAP) and Fixed Assets on the Quality of Financial Statements in Bandung Regency Local Government. Financial Statements in the Bandung Regency Regional Government. Population in this study were all employees in 25 (twenty-five) Organizations of Regional Organization (OPD) in the Bandung Regency Regional Government. The criteria who were sampled in this study in 1 (one) agency, namely, the Head of OPD as the leader of policy makers, the Secretary as the manager of the OPD. OPD as the leader of policy makers, the Secretary as the manager of administration, the Finance Section as the manager of financial reports. administration, the Finance Section as the manager of financial reports and the BMD Management Section as the manager of Regional Property (BMD). The sampling technique is using purposive sampling technique with a total of 100 respondents. The type of data used is primary data with data collection method using a questionnaire. Data analysis techniques using multiple linear regression analysis using the SPSS Version 23 program. The results showed that both partially and

simultaneously the variables Implementation of Government Accounting Standards (SAP) and Fixed Assets has a positive and significant effect on the Quality of Financial Statements on positive and significant on the Quality of Financial Statements in the Bandung Regency Bandung Regency Regional Government.

Keywords: *Government Accounting Standards (SAP), Fixed Assets and Quality of Financial Statements*

PENDAHULUAN

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara dapat diwujudkan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kualitas informasi dalam laporan keuangan pemerintah tersebut sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi dan didukung oleh sebuah sistem akuntansi yang handal.

Untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kompetensi aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Terbatasnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman / penguasaan aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disetiap tahunnya akan mendapatkan penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika Badan Pengawas Keuangan memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan, artinya dapat dikatakan bahawa laporan keuangan suatu organisasi tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Lima tahun berturut-turut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat (Jabar). Opini WTP tersebut diraih antara lain dari mulai Tahun Anggaran (TA) 2015 hingga 2020, LHP diterima langsung Bupati Bandung H.M. Dadang Supriatna, S.I.P., M.Si. dari Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Adapun uraian di atas dapat disimpulkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. 1 Hasil Pemeriksaan BPK Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung

No	Tahun	Opini
1	2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2	2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
6	2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : https://jabar.bpk.go.id/lhp-lkpd-3/ (Data diolah kembali oleh penulis)

Selain itu, hal yang mendasar dan penting dari penerapan akuntansi di dalam penyusunan laporan keuangan daerah salah satunya adalah sistem akuntansi. Sebagaimana pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Dalam mengelola keuangan daerah, pemerintah daerah menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi dalam pertanggungjawaban penggunaan dana dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pada dasarnya Pemerintah Daerah telah berupaya untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah yang diharapkan mampu mewujudkan tercapainya transparansi dan akuntabilitas. Pengembangan sebuah sistem yang tepat untuk dapat diimplementasikan di daerah menghasilkan suatu sistem akuntansi keuangan daerah yang diharapkan dapat mengganti sistem akuntansi. Masih buruknya pembenahan pengelolaan keuangan baik di pemerintah pusat maupun daerah saat ini tidak terlepas dari faktor penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang masih tergolong baru di lingkungan pemerintah.

Adanya upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan harus sesuai dengan SAP yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2010, menyatakan bahwa SAP

dijelaskan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yang dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Subagyo menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah akan dilaporkan kepada DPR/DPRD dan selanjutnya dapat diakses oleh masyarakat setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Komponen laporan keuangan yang disampaikan sesuai PP 71 Tahun 2010 meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah diharapkan mampu menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dan pengambilan keputusan. Pemerintah diwajibkan untuk memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang bertujuan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi.

Informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu : relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan yang berkualitas harus disusun sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang terdapat dalam SAP. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus mengacu kepada SAP yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tersebut yang berfungsi sebagai acuan untuk menilai apakah LKPD disusun telah sesuai dengan SAP.

Aset tetap merupakan bagian utama aset pemerintah daerah karena nilainya yang sangat signifikan dalam neraca. Penilaian aset sangat penting bukan saja dalam rangka pelaksanaan

penghapusan dan pemindah tanganan aset/barang milik daerah yang dilelang/dijual, tetapi secara praktis memiliki hubungan langsung dengan, penyajian neraca daerah. Menurut Setiadi, jika aset tetap tidak dikelola dengan baik dapat mempengaruhi opini yang diberikan BPK, karena aset tetap merupakan komponen laporan keuangan yang signifikan. Perolehan opini atas LKPD Pemerintah Kabupaten Bandung sebelum penerapan PP71/2010 berbasis akrual belum mendapat opini WTP. Hasil evaluasi BPK yang termuat dalam setiap LHP dan termuat dalam beberapa Siaran Pers BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang menyatakan bahwa pemeriksaan meliputi penilaian atas penggunaan SAP oleh entitas dan penyajian laporan keuangan secara keseluruhan, bahwa permasalahan yang menjadi dasar pertimbangan penetapan opini antara lain adalah masalah aset tetap.

Fenomena yang didapat dari hasil wawancara dengan Bapak Isman Nana Supriatna bagian Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) pada tanggal 10 Maret 2023, beliau menjelaskan bahwa aset yang disajikan Pemda, terdiri dari aset lancar dan aset tetap, harus disajikan dalam nilai yang wajar. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, sedangkan penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Jika nilai wajar aset telah dicantumkan dalam laporan keuangan, maka laporan tersebut sudah dapat dikatakan bisa dipercaya dan diandalkan. Menurut beliau, pengelolaan aset di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung masih belum optimal, baik dari segi pencatatan, pemeliharaan sampai ke penghapusan, banyaknya aset yang masih belum sesuai antara keberadaan dan kondisi fisik aset dengan pencatatan aset. Fenomena keberadaan fisik diantaranya ikut beralihnya keberadaan aset yang dipegang oleh pemegang aset ketika terjadi mutasi atau purnabhakti pemegang aset. Sementara kondisi fisik yaitu banyaknya aset yang sudah tidak memiliki nilai buku karena penyusutan aset melebihi nilai guna yang belum dimasukan ke dalam kategori aset lainnya untuk dilakukan penghapusan aset.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nopiandi Muhamad Mauludin bagian Pengelola Barang Milik Daerah (BMD) pada tanggal 31 Juli 2023 mengatakan bahwa saat ini sedang diadakannya sensus data aset di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, beliau memiliki kendala seperti terbatasnya waktu, yang diberikan 2 (dua) minggu atas pengumpulan data aset, sedangkan sensus data aset perlu mengelilingi Kecamatan se-Kabupaten Bandung dan

memerlukan waktu yang cukup lama. Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas untuk mengelola Barang MIlik Daerah (BMD) pun menjadi salah satu kendala. Setelah mendapatkan pendataan sensus ternyata masih ada kurangnya pengawasan dan pengendalian internal, seperti risiko kesalahan atau kecurangan dalam pelaporan data aset dan keuangan.

Untuk menindaklanjuti hasil dari pemeriksaan BPK RI, maka peneliti ingin mengkaji secara mendalam pada salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bandung (Pemkab Bandung). Meskipun Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK, bukan berarti daerah tersebut bebas dari penyimpangan. Pengkajian dilakukan terbatas pada beberapa faktor penyebab kualitas laporan pemerintah daerah antara lain, penerapan Standar Akuntasnsi Pemerintahan (SAP) dan aset tetap. Tujuannya adalah untuk menganalisis besarnya pengaruh masing-masing terhadap kualitas laporan keuangan.

Hal ini berdasarkan penelitian Arif Ardi Kusumah (2014) Jurnal Pengaruh Penerapan Standar Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya), mengatakan terdapat pengaruh signifikan antara Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu bahwa semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan maka kualitas laporan keuangan semakin baik. Oleh karena itu, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mempunyai pengaruh kuat terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan penelitian Baiq Reinelda Tri Yunarni dan Handoyo Wirastomo (2022) Jurnal Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat), mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penatausahaan aktiva tetap terhadap kualitas laporan keuangan.

Kajian Pustaka

a. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Menurut penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang kemudian mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun berdasarkan pada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, merupakan upaya untuk menyamakan sikap dan visi dalam melaksanakan aturan-aturan tersebut terdahulu, dalam paradigma pemerintahan daerah yang bertumpu pada nilai-nilai demokratisasi, pemberdayaan, dan

pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintah yang bersih.

Penetapan peraturan ini sekaligus merupakan terobosan baru dalam sejarahpengelolaan keuangan nasional. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005, SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Dengan berlakunya SAP, laporan dari pemerintah pusat dan daerah yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dengan demikian, laporan keuangan dari pemerintah akan lebih mudah dipahami dan dapat diukur tingkat kualitasnya berdasarkan standar-standar akuntansi pemerintahan tersebut.

b. Pengertian Aset Tetap

Menurut PSAK No. 16 revisi tahun 2011 pengertian aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan, baik berwujud maupun tidak berwujud yang berharga atau bernilai yang akan mendatangkan manfaat bagi seseorang atau perusahaan tersebut. Aset atau aktiva adalah harta atau sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan yang diharapkan memberikan manfaat usaha dalam operasi perusahaan. Aset yang dimasukkan dalam neraca dengan saldo normal debit.

Menurut Martani Aset adalah sebagai sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh. Aset merupakan harta yang dimiliki perusahaan dapat berupa aktiva lancar (modal kerja perusahaan) dan aktiva tetap (harta yang dapat digunakan dalam masa waktu yang panjang lebih dari satu tahun), dengan demikian maka aktiva merupakan harta yang dipunyai perusahaan di masa tertentu. Sementara aktiva tetap merupakan harta perusahaan dengan atau tidak berwujud, memiliki manfaat ekonomis melebihi satu periode yang berguna bagi kegiatan usaha. Total aset memiliki hubungan dengan laba bersih, berdasarkan pendapat bahwa semakin tinggi total aset maka profit yang diperoleh semakin tinggi, hal ini dikarenakan perusahaan dapat menggunakan aktiva dalam peningkatan volume penjualan yang berpengaruh terhadap pendapatan.

Pengertian aset tetap menurut IAI, PSAK adalah Aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode

c. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Harnanto (2019:102) menuliskan bahwa pendapatan adalah kenaikan atau bertambahnya aset dan penurunan atau berkurangnya liabilitas perusahaan yang merupakan akibat dari aktivitas operasi atau pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat atau konsumen pada khususnya.

Menurut Sochib (2018:47) pendapatan merupakan aliran masuk aktiva yang timbul dari penyerahan barang/jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama periode tertentu. Bagi perusahaan, pendapatan yang diperoleh atas operasi pokok akan menambah nilai aset perusahaan yang pada dasarnya juga akan menambah modal perusahaan. Namun untuk kepentingan akuntansi, penambahan modal sebagai akibat penyerahan barang atau jasa kepada pihak lain dicatat tersendiri dengan akun pendapatan.

Objek dan Metode Penelitian

Sesuai judul penelitian yang dipilih, maka objek dalam penelitian ini adalah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Aset Tetap dan Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang beralamat di Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Jl. Raya Soreang KM. 17, Bandung.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi survei menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini menggunakan keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari mengumpulkan data, mengolah, menganalisis dan menginterpretasi data tersebut dalam pengujian hipotesis statistik.

Populasi

Menurut Sugiyono (2018:80), mendefinisikan populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi seluruh pegawai di 2 (dua puluh lima) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Sampel

Menurut Sugiyono (2018:62) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul refresentatif (mewakili).

Teknik penentuan sampel yang

digunakan pada penelitian ini yaitu dengan metode *non probability sampling* artinya setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama sebagai sampel. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan *purposive sampling,* sesuai dengan namanya sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya. Adapun kriteria sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepala OPD sebagai pimpinan pengambil kebijakan sebanyak 1 (satu) orang.
2. Sekretaris OPD sebagai pengelola administrasi sebanyak 1 (satu) orang.
3. Bagian Keuangan sebagai pengelola laporan keuangan sebanyak 1 (satu) orang.
4. Bagian Pengelola BMD sebagai pengelola Barang Milik Daerah (BMD) sebanyak 1 (satu) orang.

Jadi, total sampel : 4 Orang / Dinas x 25 Dinas = 100 Orang.

Metode Analisis

Teknik Analisis Deskriptif

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel Penerapan Standar Auntansi Pemerintahan (X_1), Aset Tetap (X_2), dan Kualitas Laporan Keuangan (Y) dengan cara menghitung rata-rata masing-masing variabel penelitian seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Kriteria Penafsiran Kondisi Variabel Penelitian

Rata-Rata Skor	Penafsiran
4,21 – 5,00	Sangat baik
3,41 – 4,20	Baik
2,61 – 3,40	Cukup Baik
1,81 – 2,60	Kurang baik
1,00 – 1,80	Sangat kurang baik

Teknik Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X_1,X_2,...X_n) dengan variabel dependen (Y), apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan seperti yang

telah dikemukakan oleh Sugiyono (2018:275) bahwa:

"Analisis regresi ganda digunakan bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik/turunnya) variabel independen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor *predictor* dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2".

Analisis Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan sebab akibat yang terjadi antara penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan kualitas laporan keuangan dan aset tetap dengan kualitas laporan keuangan. Adapun untuk menetahui kuat lemahnya hubungan dilihat pedoman tabel kriteria koefisien korelasi sebagai berikut:

Tabel 3.2 Koefisien Korelasi dan Taksirannya

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat Lemah
0,20 - 0,399	Lemah
0,40 - 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (2017:231)

Uji Pengaruh

Koefisien Determinasi

Setelah koefisien korelasi ganda (R) diketahui serta untuk membuktikan hasil pengaruh secara simultan, maka selanjutnya adalah menghitung koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut:

$$KD = R^2.100\%$$

Sumber : Ghozali (2013:98)

Keterangan :

KD = Koefisien Determinasi

R^2 = Koefisien Korelasi Dikuadratkan

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:

1. Jika KD mendekati nol (0), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat lemah.
2. Jika KD mendekati satu (1), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat kuat.

1. Pengujian Hipotesis

Menurut Sugiyono (2018) mendefinisikan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis nol (H_o) adalah pernyataan tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik (data sampel) sedangkan hipotesis alternatif (H_a) adalah pernyataan ada perbedaan antara parameter dan statistik. Maka H_o tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan H_a menunjukan adanya dampak antara variabel bebas dan variabel terikat. Hipotesis yang dirumuskan dapat diuji melalui pengujian hipotesis berikut ini :

a. Uji Hipotesis t (Uji-t)

Uji-t statistik digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan, secara individu. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan $t_{tabel.}$ selanjutnya membuat kesimpulan mengenai diterima atau tidaknya hipotesis setelah dibandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan ketentuan uji sebagai berikut:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ (0,05) maka H_o ditolak dan H_a diterima (berpengaruh signifikan).
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ (0,05) maka H_o diterima dan H_a ditolak (tidak berpengaruh sigifikan).
3. Apabila menggunakan program computer (*software SPSS*), jika nilai sig < a = 5% (0,05) maka H_o ditolak.

b. Uji Hipotesis F (Uji-F)

Uji-F dikenal dengan uji serentak atau uji model/uji anova, yaitu uji untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Kriteria pengujian dengan membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} yaitu:

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_o ditolak dan H_a diterima (berpengaruh).
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_o diterima dan H_a ditolak (tidak berpengaruh).
3. Apabila menggunakan program computer (*software SPSS*), jika nilai sig < a = 5% (0,05) maka H_o ditolak.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.1 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-5.292	1.834		-2.886	.005
	SAP	.971	.104	.760	9.296	.000
	ASET_TETAP	.229	.110	.170	2.082	.040

a. Dependent Variable: KUALITAS_LAPKEU

Sumber : Pengolahan data dengan SPSS Versi 23

Berdasarkan hasil perhitungan secara manual maupun SPSS diatas, jadi didapat persamaan sebagai berikut:

$$Y = -5{,}292 + 0{,}971\ X_1 + 0{,}229\ X_2$$

Persamaan regresi linear berganda yang diperoleh tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Konstanta dengan nilai -5,292 menunjukkan bahwa apabila tidak terdapat variabel independen (X_1 dan X_2 = 0), maka Kualitas Laporan Keuangan adalah sebesar -5,292.
b. b_1 sebesar 0,971 hasilnya positif, ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,971 dengan asumsi variabel lain tetap (konstan).
c. b_2 sebesar 0,229 hasilnya positif ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Aset Tetap sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,229 dengan asumsi variabel lain tetap (konstan).

Analisis Korelasi

Tabel 4.2 Hasil Analisis Korelasi *Pearson Product Moment*

Correlations

		SAP	ASET_TETAP	KUALITAS_LAPKEU
SAP	Pearson Correlation	1	.858**	.906**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	100	100	100
ASET_TETAP	Pearson Correlation	.858**	1	.823**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	100	100	100
KUALITAS_LAPKEU	Pearson Correlation	.906**	.823**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Pengolahan data dengan SPSS Versi 23

Tabel 4.3 Hasil Analisis Korelasi Ganda

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.910[a]	.829	.825	2.62133

a. Predictors: (Constant), ASET_TETAP, SAP

b. Dependent Variable:
KUALITAS_LAPKEU

Sumber : Pengolahan data dengan SPSS Versi 23

Dilihat dari dua tabel perhitungan korelasi diatas, menujukkan bahwa:

a. korelasi antara Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan Kualitas Laporan Keuangan adalah sebesar 0,906. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi antara 0,80–1,000 artinya mempunyai hubungan yang sangat kuat. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) akan diikuti oleh kenaikan Kualitas Laporan Keuangan.
b. Korelasi antara Aset Tetap dengan Kualitas Laporan Keuangan adalah sebesar 0,823. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi antara 0,80–1,000 artinya mempunyai hubungan yang sangat kuat, karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Aset Tetap akan diikuti oleh kenaikan Kualitas Laporan Keuangan.
c. Korelasi ganda antara Standar AKuntansi Pemerintahan (SAP) dan Aset Tetap dengan Kualitas Laporan Keuangan adalah sebesar 0,910. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi antara 0,80–1,000 mempunyai hubungan yang sangat kuat. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Aset Tetap secara bersama-sama, maka akan diikuti oleh kenaikan Kualitas Laporan Keuangan.

Analisis Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.3, bahwa secara simultan dengan melihat besarnya koefisien determinasi (*R square)* yang diperoleh adalah sebesar 0,829. Nilai R *Square* menunjukkan nilai koefisien determinasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai KD = 0,829 (82,9%). Artinya, Kualitas Laporan Keuangan dipengaruhi oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Aset Tetap sebesar 82,9%.

Uji-t (Parsial) dan Uji-F (Simultan)

Uji-t (Parsial)

Untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian, maka dilakukan pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

maka Ho ditolak dan Ha diterima (berpengaruh).

- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada α = 5% maka Ho diterima dan Ha ditolak (tidak berpengaruh).

a. Pada tabel 4.1 di atas nilai t-hitung untuk Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (X_1) adalah 9,296 pada t_{tabel} dengan dk 97 (n-3 = 100-3) dan taraf signifikan 0,05 diperoleh 1,661 (lihat t_{tabel} pada lampiran). Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ (9,296>1,661) maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

b. Pada tabel 4.1 di atas nilai t-hitung untuk Aset Tetap (X_2) adalah 2,082 pada t_{tabel} dengan dk 97 (n-3 = 100-3) dan taraf signifikan 0,05 diperoleh 1,661 (lihat t_{tabel} pada lampiran). Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,082>1,661) maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Uji-F (Simultan)

Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3229.912	2	1614.956	235.027	.000[b]
	Residual	666.522	97	6.871		
	Total	3896.434	99			

a. Dependent Variable: KUALITAS_LAPKEU

b. Predictors: (Constant), ASET_TETAP, SAP

Sumber : Pengolahan data dengan SPSS Versi 23

Untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian, maka dilakukan pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada α = 5% maka H_o ditolak dan H_a diterima (berpengaruh).
- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada α = 5% maka H_o diterima dan H_a ditolak (tidak berpengaruh).

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} adalah 23,027 sedangkan F_{tabel} dapat diperoleh dengan tabel F derajat bebas yaitu residual 97 dan regresi 2 dengan taraf signifikan 0,05, sehingga diperoleh F_{tabel} sebesar 3,09 (lihat F_{tabel} pada lampiran). Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$, (235,027>3,09) maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Pembahasan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah didapat, maka pembahasan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) akan diikuti oleh kenaikan Kualitas Laporan Keuangan, demikian pula sebaliknya. hal ini ditunjukkan pula oleh nilai koefisien korelasi yang memiliki hubungan yang positif. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori yang diutarakan oleh Dedi Nordiawan yang menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan baik di Pemerintah Pusat dan Daerah. Selain itu juga menurut jurnal oleh Arif Ardi Kusumah menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan mempunyai pengaruh kuat terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Aset Tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa variabel Aset Tetap secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Aset Tetap akan diikuti oleh kenaikan Kualitas Laporan Keuangan, demikian pula sebaliknya. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya, jurnal yang diutarakan oleh Baiq Reinelda Tri Yunarni, Handoyo Wirastomo yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penatausahaan aktiva tetap terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah.

Pengaruh Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan Aset Tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa secara simultan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Aset Tetap berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil penelitian di atas dikatakan bahwa variabel penerapan Standara Akuntansi pemerintahan (SAP) dan Aset Tetap secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, artinya kualitas laporan keuangan akan

menjadi baik apabila dipengaruhi oleh kemampuan OPD dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Aset Tetap dalam menyusun laporan keuangan daerah. Dengan meningkatnya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Aset Tetap akan mempermudah OPD dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah yang baik.

Selain hal tersebut, hasil penelitian ini juga didukung oleh teori Kadek Desiana Wati bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas maka harus baik dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan baik pula sistem pengendalian internal pemerintah.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Aset Tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung, maka peneliti dapat menarik simpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengolahan data deskriptif, dapat digambarkan bahwa variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung berada pada kategori "Baik", namun masih perlu ada peningkatan pada setiap bagian kerja yang berkecimpung langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Karena, kualitas laporan keuangan daerah pada hakikatnya memiliki kaitan yang sangat erat dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hal ini berarti, dengan diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah telah memenuhi karakteristik kualitatif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Berdasarkan hasil pengolahan data deskriptif, dapat digambarkan bahwa variabel Aset Tetap pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung berada pada kategori "Baik". Karena, pada dasarnya semakin baik pengelolaan Aset Tetap pada suatu instansi diterapkan maka akan semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan daerah yang dihasilkan.
3. Berdasarkan hasil pengolahan data deskriptif, dapat digambarkan bahwa variabel Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung berada pada kategori " Sangat Baik". Ini berarti sejalan dengan opini dari BPK yang menunjukan bahwa selama lima tahun berturut-turut

Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

4. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini menurut pengamatan peneliti dinyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) apabila diterapkan dengan baik oleh Sumber Daya Manusia (SDM) di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung maka akan menunjang kualitas laporan keuangan daerah, karena Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah tolak ukur dalam penyusunan laporan keuangan daerah.
5. Aset Tetap secara parsial secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini menurut pengamatan peneliti bahwa apabila pengelolaan Aset Tetap dilakukan dengan baik pada setiap proses dan kegiatan yang dilakukan, maka akan tercipta yang transparan, jauh dari kecurangan yang mungkin terjadi akibat tidak adanya pengendalian. Pada setiap proses dan kegiatan pengendalian juga harus terus dilakukan *review* kerja untuk mengetahui sejauh mana kegiatan terlaksana sesuai dengan tujuan dari pemerintah.
6. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Aset Tetap secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini dikarenakan kedua faktor tersebut benar-benar saling melengkapi dan tidak bisa sendiri-sendiri dalam mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA :

Indonesia, Ikatan Akuntan. "P s a K" 30, no. revisi (2011).

Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan. Edisi Revisi. Cetakan Ketiga Belas*. *Rajawali Pers*, 2021.

Martani, D, S Veronica, R Wardani, and A Farahmita. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. *Jakarta: Salemba Empat*, 2012.

Nordiawan, Dedi. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat, 2010

P, Purba Marisi. *International Financial Reporting Standards : Konvergensi Dan Kendala Aplikasinya Di Indonesia*. Satu. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Pura, SE., M.Si, Rahma. *Pengantar Akuntansi 1 : Pendekatan Siklus Akuntansi*. Edited by Suryadi Saat. Jakarta: Erlangga, 2013.

Sedarmayanti, and Syarifudin Hidayat, eds. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2011.

Subagyo, Nur Aini Masruroh, and Indra Bastian. *Akuntansi*

Manajemen Berbasis Desain. *Gadjah Mada University Press*, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D.Bandung:Alfabeta. Metode Penelitian Kualitatif Dan R & D.Bandung:Alfabeta.*, 2018.

Wati, Kadek Desiana, SAP dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Bali : Undiksha, 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010

Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Halim dalam (Putri, 2018) Putri, H. T. (2018). Pengaruh Total Persediaan, Total aset dan Total Modal terhadap Laba Bersih pada Sub Sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2016. *Journal of Economics and Business*, 2(2), 2016–2217.

Kusumah Arif Ardi. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan .*E-Jurnal* Universitas Siliwangi.

Mahaputra, I Putu Upabayu Rama dan I Wayan Putra. 2014.Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Gianyar).*E-Jurnal* Akuntansi Universitas Udayana 8.2 (2014):230-244.

Yunarni Baiq Reinelda Tri Yunarni, Handoyo Wirastomo. (2022). Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan "Studi Kasus pada Bappeda Kabupaten Lombok Barat". Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Mataram.

https://jabar.bpk.go.id/lhp-lkpd-3/ (diakses pada hari Minggu, 26 Februari 2023, pukul 11.47 AM)

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15584/Implementasi-Indeks-Pengelolaan-Aset-IPA-sebagai-Penguatan-*Good-Governance*-dalam-Pengelolaan-BMN.html (diakses pada hari Sabtu, 29 April 2023, pukul 08:55 PM)